KELANA KOTA

Fadli Zon Dukung PTUN Tolak Gugatan Koalisi Sipil Atas Dirinya Soal Tragedi 98

Laporan oleh Billy Patoppoi

Senin, 27 April 2026 | 10:16 WIB



Fadli Zon Menteri Kebudayaan RI. Foto: Biro Pers Setpres

Fadli Zon Menteri Kebudayaan mendukung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terkait pernyataannya mengenai pemerkosaan massal Mei 1998.

LIVE STREAMING

Berita kecelakaan terkini

Dengar Radio

“Saya pikir putusan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Menurut pendapat saya memang tidak ada satu bukti yang mendukung adanya perkosaan massal pada 1998. Kalau ada perkosaan mungkin saja terjadi, tapi bukan state actor, bukan sistematis,” kata Fadli Zon di Beijing pada Minggu (26/4/2026) malam.

Menurut laporan dari *Antara,* pada 21 April 2026, PTUN Jakarta menolak gugatan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terkait pernyataan Fadli Zon. Majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut dengan menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Majelis hakim menilai objek sengketa yang berupa pernyataan Fadli Zon tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara karena tidak menimbulkan akibat hukum yang konkret, individual, dan final.

Fadli Zon sebelumnya menyampaikan pandangan terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 dalam sebuah podcast pada 10 Juni 2025 serta pernyataan resmi pada 16 Juni 2026. Pernyataan tersebut menyinggung laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang disebutnya tidak didukung bukti kuat seraya menyerukan agar tidak “mempermalukan bangsa sendiri”.

“Peristiwa pemerkosaan pada 1998 itu bukan terstruktur, tetapi pelakunya kriminal, preman, dan sebagainya. Kita tidak ingin membelokkan sejarah. Saya juga sudah melakukan studi dan menulis buku soal ini,” ujarnya.

Temukan lebih banyak

Informasi lalu lintas

Berita lokal Surabaya

LIVE STREAMING

Menurut dia, pernyataannya itu tak ada kaitannya dengan penyusunan ulang buku sejarah oleh K Kebudayaan. Pasalnya, proses penulisan sejarah tidak dipengaruhi oleh pernyataan yang pernah ia sampaikan

dalam forum publik.

Pemerintah tak boleh membelokkan sejarah, lanjut dia, seraya menyebut bahwa tidak terdapat bukti hukum yang menunjukkan peristiwa tersebut sebagai tindakan yang terstruktur oleh negara.

“Bahwa memang hal itu tidak terjadi, dan tidak ada bukti hukumnya. Tapi kalau pemerkosaannya, ya mungkin saja terjadi, tapi bukan seperti bayangan orang ketika bicara seperti ada aktor yang merencanakan isalnya seperti kejadian ‘Nanjin Massacre’ di China, ada ribuan perempuan diperkosa oleh tentara Jepang atau seperti perkosaan terhadap orang Bosnia oleh tentara Serbia, baru itu ‘state actor’ sementara kalau yang terjadi pada 1998 itu ‘riots’ (kerusuhan),” jelas Fadli.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggugat Fadli Zon ke PTUN Jakarta pada 11 September 2025. Gugatan itu dilayangkan karena menilai pernyataan Fadli menyangkal pemerkosaan massal Mei 1998 sekaligus mendelegitimasi kerja TGPF.

Penggugat menilai pernyataan Fadli Zon melampaui kewenangan Menteri Kebudayaan dan bertentangan dengan sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Gugatan itu diajukan usai upaya keberatan administratif kepada Fadli Zon dan banding administratif kepada Presiden tidak mendapat tanggapan. Daniel Winarta, Pengacara publik LBH Jakarta menyatakan pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.(ant/mar/iss)

Fadli Zon | Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas | Menteri Kebudayaan | Pemerkosaan massal Mei 1998 | Pengadilan Tata Usaha Negara | ptun

Bagikan

KONTEN PROMOSI

mgid

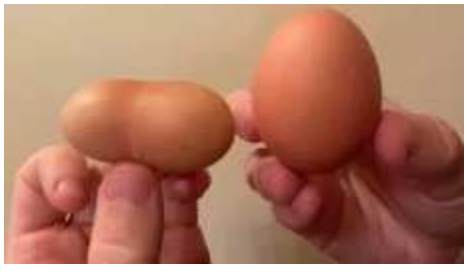
Brainberries


Brainberries



Brainberries



Brainberries

9 Iconic Roles Nobody Wanted To Play



Brainberries

Former Child Actors Accused Of Horrible Crimes



Brainberries

The Truth About Ashton's Hidden Health Struggles

BERITA TERKAIT



Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Fadli Zon Sebut Serangan Israel Ancam Kemanusiaan dan Warisan Budaya



Fadli Zon Instruksikan Kebijakan Efisiensi dalam Program Kementerian Kebudayaan



Komnas HAM Desak Jaksa Agung Segera Usut Peristiwa Mei 98

NOW ON AIR SSFM 100

Alvanni Kinandhani



RADIO STREAMING

RADIO ON DEMAND

VISUAL RADIO

LIVE STREAMING

SUARA SURABAYA MEDIA

TERKINI • POPULER • TERPILIH

- Mangkir Dua Kali, Listyo Sigit Terancam Kehilangan Hak Banding atas Putusan Sidang Etik
- IHSG Dibuka Menguat 0,33 Persen Ikuti Bursa Asia di Tengah Cermati Arah The Fed
- Pemkot Surabaya Akan Rekrut Pendamping Guru Pada 2027 Untuk Atasi Keterbatasan Jumlah Tenaga Pendidik
- Houthi Serang Pelabuhan Kota Jizan di Arab Saudi
- Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp2,501 Juta per Gram pada Kamis

POTRET NETTER

Selengkapnya



Kholis

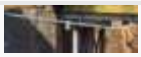

Selasa, 10 November 2026



Christian Mulyono

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Kamis, 5 November 2026



Edy Suprijo

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Kamis, 5 November 2026

Surabaya

Kamis, 26 November 2026

35°

INFOGRAFIS

Selengkapnya



Rute Parade Suarabaya Juang 2026, Berikut Rekayasa Lalu lintasnya!



Kejinya Suami Siri di Madiun Lenyapkan Istri dan Anak



Jawa Timur Lumbung Padi Terbesar Indonesia

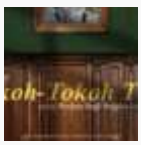

Mengenal Tokoh-Tokoh TNI yang Berjasa bagi Negara Indonesia

LIVE STREAMING



suarasurabaya.net

PT RADIO FISKARIA JAYA SUARA SURABAYA, Suara Surabaya Media www.suarasurabaya.net adalah portal berita yang berdiri sejak tahun 1999, bagian dari Suara Surabaya Media yang lahir sejak 11 Juni 1983

TAUTAN

KELANA KOTA
POLITIK
OLAHRAGA
POTRET KELANA KOTA
POTRET NETTER
SENGGANG
KURS

BERITA TERPOPULER



Habib Syarief Soroti Dugaan Pelanggaran Privasi Siswi SMPN 21 Surabaya: Disiplin Tak Boleh Langgar Martabat Anak



Pra Kongres Bangsa Indonesia Dukung Prabowo Pimpin Revolusi Sesuai K

LIVE STREAMING

SUARASURABAYA.NET © 2023

LIVE STREAMING